

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Dari hasil analisis penelitian mengenai Analisis Analisis Kinerja Keuangan Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi NTT Tahun Anggaran 2012-2014 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil Analisis Proporsi bahwa, Pola alokasi anggaran belanja langsung selama tahun anggaran 2012-2014 sebesar : pada tahun 2012 alokasi belanja terbesar adalah belanja modal yaitu sebesar 5,31%, pada tahun 2013 alokasi belanja terbesar adalah belanja modal yaitu sebesar 65,50%, pada tahun 2014 alokasi belanja terbesar adalah belanja modal yaitu sebesar 53,31%. Jadi selama 3 tahun proporsi terbesar adalah belanja modal dan 1 tahunnya proporsi terbesar adalah belanja modal. Alokasi anggaran yang relatif sedikit adalah belanja barang dan jasa.

Pola alokasi anggaran belanja tidak langsung selama tahun anggaran 2012-2014 sebesar : pada tahun 2012 alokasi belanja terbesar adalah belanja pegawai yaitu sebesar 79,31%, pada tahun 2013 alokasi belanja terbesar adalah belanja pegawai yaitu sebesar 68,07%, dan pada tahun 2014 alokasi belanja terbesar adalah belanja pegawai yaitu sebesar 80,08%. jadi selama 3 tahun tersebut proporsi terbesar adalah belanja pegawai sedangkan yang mendapat alokasi anggaran yang relatif sedikit selama 3 tahun adalah belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga.

2. Analisis efisiensi menunjukkan bahwa selama tahun 2012-2014 tingkat efisiensi belanja langsung dan belanja tidak langsung pada Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi NTT mencapai 90%-100% yang artinya kurang efektif.
3. Selama tahun anggaran 2012-2014 laju pertumbuhan belanja langsung pada Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi NTT adalah tahun 2013 laju pertumbuhan menunjukkan penurunan sebesar 28,75%, hal ini menunjukkan tidak terjadi pertumbuhan belanja. Tahun 2014 laju pertumbuhan menunjukkan penurunan yaitu sebesar 14,50. Sedangkan untuk belanja tidak langsung pada Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi NTT tahun 2012 menunjukkan peningkatan pertumbuhan sebesar 100% ini berarti terjadi pertumbuhan belanja. Tahun 2013 laju pertumbuhan menunjukkan peningkatan sebesar 100% dan pada tahun 2014 menunjukkan adanya peningkatan sebesar 100%.

6.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis memberikan saran kepada Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi NTT sebagai berikut:

1. Dinas Peratambangan dan Energi harus megetahui permasalahan-permasalahan dengan benar Khususnya pertambangan dan Mineral perlu melakukan analisis hasil dan analisis strategi, supaya program-program yang ada tepat dan sesuai dengan kebutuhan dan potensi sumber daya pertambangan dan Mineral.

2. Perlu mengadakan sosialisasi terhadap pengusaha-pengusaha mengenai potensi-potensi pertambangan yang ada serta peluang-peluang yang ada di Kabupaten/Kota.
3. Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Nusa Tenggara Timur harus lebih bersikap tegas dalam memberikan sanksi terhadap pengusaha-pengusaha pertambangan tanpa izin (ilegal).

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Halim. 2004. Bunga Rampe Manajemen Keuangan Daerah Edisi Revisi. UPP AMP YKPN.

2004, *Akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi Revisi Penerbit Salemba Empat Jakarta.

Bastian Indra, 2005, *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*, Penerbit Erlangga.

Mardiasmo, 2002. Akuntansi Sektor Publik; Hal.61-63, Penerbit Andi, Yogyakarta

Mahmudin Manajemen Kinerja Sektor Publik, Hal UPP STIM YKPN, Yogyakarta

Mariana, Dede. 2005, *Otonomi Daerah dan Reformasi APBD, Teropong- Suplemen Pemikiran Rakyat, (Online), diakses 14 September 2006*

Munur, 2004, *Analisis Laporan Keuangan, Liberty, Yogyakarta*

Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005, *Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*.

Permendagri No. 13 Tahun 2006 dan Permendagri No. 59 Tahun 2007. *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*, Penerbit Fokusmedia.

Soedjono, 2000. *Strategi Sumber Daya Manusia untuk Pengendalian Jumlah Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Rutin dalam Rangka Otonomi Daerah*, Ekuitas, Vol 4, hal 233-256.

Yudisianta, Reza Dwi. 2007. *Analisis Pengaruh Pemberlakuan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Skripsi. Universitas brawijaya. Malang.*